



# PANDUAN

## RAPAT KOORDINASI NASIONAL II

BAN PAUD DAN PNF DENGAN BAN PAUD DAN PNF PROVINSI  
TAHUN 2020

## **TIM PENYUSUN**

Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.  
Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.  
Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Psi.  
Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.  
Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd.  
Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.  
Dr. H. Habiburrahman, M.Pd.  
Dr. Gutama, M.Pd.  
Dr. Hj. Hibana, S. Ag., M.Pd.  
Bahruddin  
Ade Cahyana, M.Sc.  
Dr. Biyanto, M.Ag.  
Dr. Firman Hadiansyah, M.Hum.  
Nasrulloh, S.E., M. Si.(Han).

## **BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (BAN PAUD DAN PNF)**

### **SEKRETARIAT**

Komplek Ditjen Dikdasmen Kemendikbud, Gedung F Lantai 2  
Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12410  
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141  
e-mail: [info@banpaudpnf.or.id](mailto:info@banpaudpnf.or.id)  
website: [banpaudpnf.kemdikbud.go.id](http://banpaudpnf.kemdikbud.go.id)

## KATA PENGANTAR

Kebijakan moratorium akreditasi BAN PAUD dan PNF tahun 2020 dan pandemi Covid-19 berpengaruh pada kebijakan dan mekanisme akreditasi PAUD dan PNF. Kebijakan moratorium mengharuskan BAN PAUD dan PNF meninjau kembali seluruh sistem akreditasi, sedangkan Pandemi Covid-19 mengharuskan penyelenggaraan kegiatan BAN PAUD dan PNF dilakukan dengan model *online* melalui kebijakan bekerja dari rumah (*Work from Home/WfH*). Dua peristiwa tersebut menghendaki BAN PAUD dan PNF mengatur kembali hampir semua kebijakan, mekanisme, dan program kerja akreditasi yang dijalankan.

Kegiatan BAN PAUD PNF tahun 2020 ini terdiri dari empat aktivitas besar, yaitu (1) pengembangan instrumen EDS-PA dan Instrumen Penilaian Visitasi, (2) pengembangan sistem aplikasi akreditasi, (3) pelatihan asesor, dan (4) piloting akreditasi; ditambah dengan kegiatan manajemen. Masing-masing kegiatan dirinci menjadi sub-sub kegiatan, sehingga menghasilkan instrumen yang valid dan reliabel, sistem aplikasi akreditasi yang bersifat *embrio* automasi, asesor yang kompeten sesuai dengan tuntutan automasi akreditasi berbasis satuan dan berorientasi *performance*, dan menjadi perangkat akreditasi yang kredibel sebagai penjamin mutu PAUD dan PNF.

Kini di akhir tahun saatnya kita mengevaluasi semua kinerja beserta hasil-hasilnya, serta merencanakan kegiatan tahun 2021 dan tahun ke depannya lagi sesuai Restra Kemendikbud. Pada konteks itulah, kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tahap II pada akhir tahun ini penting dilaksanakan. Dengan demikian, akuntabilitas mutu akreditasi satuan PAUD dan PNF dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.

Disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang berperan dalam penyusunan dan penyempurnaan panduan Rakornas tahap II ini. Terima kasih juga kami ucapkan pada BAN PAUD dan PNF Provinsi dan pihak lainnya yang turut menyukseskan kegiatan ini. Masukan dan saran perbaikan tetap kami harapkan dari para pihak yang menaruh kepentingan terhadap akreditasi PAUD dan PNF demi perbaikan berkelanjutan penyelenggaraan akreditasi. Hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini akan diatur kemudian sesuai dengan kebijakan BAN PAUD dan PNF.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya dan meridhoi upaya kita bersama. Aamiin yaa Robbal alamiin

Jakarta, 14 Desember 2019

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal



**Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
A. PENDAHULUAN .....	1
B. DASAR HUKUM.....	3
C. STRUKTUR BAN PAUD DAN PNF .....	5
D. TUJUAN.....	5
E. HASIL YANG DIHARAPKAN .....	6
F. KUOTA PILOTING .....	6
G. PEMBINAAN WILAYAH .....	7
H. PELAKSANAAN KEGIATAN .....	9
I. NARASUMBER, PESERTA DAN PANITIA.....	9
J. PENUTUP .....	9
K. LAMPIRAN .....	9
Lampiran 1. Materi dan Narasumber.....	10
Lampiran 2. Jadwal Kegiatan.....	11
Lampiran 3. Format Isian Rangkuman Diskusi Kelompok.....	13

## A. PENDAHULUAN

Pada tahun 2020 ini BAN PAUD dan PNF menetapkan pelaksanaan akreditasi dimoratorium. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Ketua BAN PAUD dan PNF nomor 194/K/TU/III/2020. Kegiatan BAN PAUD dan PNF tahun 2020 sebagai berikut: (1) Pengembangan Instrumen Akreditasi berupa Evaluasi Diri Satuan-Prasyarat Akreditasi (EDS-PA) dan Instrumen Penilaian Visitasi (IPV) melalui uji coba serta piloting pada 5.000 satuan pendidikan PAUD, LKP dan PKBM; (2) Peningkatan kapasitas asesor melalui pelatihan dan uji kompetensi; (3) Pengembangan Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena); (4) Melakukan sosialisasi hasil akreditasi dan mengusulkan tindak lanjutnya melalui BAN PAUD dan PNF Provinsi kepada Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, yang mengatur pembatasan sosial berskala besar sebagai respons terhadap COVID-19 maka sistem kerja dan program BAN PAUD dan PNF tahun 2020 dilaksanakan secara daring. Tercatat seluruh kegiatan telah dilaksanakan dengan kecepatan penuntasan berbeda disetiap provinsi sesuai dengan kuota dan tantangannya masing-masing.

**Pertama,** Pengembangan Instrumen Akreditasi telah dilaksanakan dengan serangkaian FGD dan uji coba yang menghasilkan Evaluasi Diri Satuan-Prasyarat Akreditasi (EDS-PA) dan Instrumen Penilaian Visitasi (IPV) berikut manualnya. Kedua instrumen ini diujicobakan lebih lanjut pada kegiatan Piloting akreditasi. Piloting akreditasi dilaksanakan agar mendapatkan instrumen yang telah teruji yang dilengkapi dengan manual penjabarannya yang meliputi antara lain deskripsi indikator dan metode penelusuran datanya. Rancangan Kegiatan ini melibatkan 5000 asesi (PAUD, LKP, PKBM) dengan samplingnya diambil dari populasi asesi yang telah diakreditasi pada tahun 2018-2019. Tercatat seluruh provinsi telah melaksanakan dan masih tersisa < 1% yang sampai hari ini masih menunggu penuntasannya.

**Kedua,** peningkatan kapasitas asesor melalui Pelatihan dan Uji Kompetensi. Kegiatan ini diawali dengan Pelatihan Calon Pelatih terhadap asesor terpilih dari semua provinsi. Meskipun semua asesor telah ditingkatkankan dan diuji kompetensinya, namun masih terdapat sebagian asesor yang masih perlu ditingkatkan kompetensinya (substansi, penggalan data, analisis data dan penguasaan IT) berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan akreditasi piloting. Penilaian dan pembinaan lebih lanjut dari BAN Provinsi sangat penting untuk diperhatikan.

**Ketiga,** pengembangan aplikasi telah dilaksanakan menjadi Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena 3.0) dengan titik berat pengembangan pada: 1) peningkatan

kualitas pelaksanaan akreditasi dengan menggunakan Sispena 3.0 dan pemeliharaan database serta sistem aplikasi yang digunakan; 2) peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak yang terlibat pengelolaan data dalam pelaksanaan akreditasi mulai dari hilir pada satuan Pendidikan sampai dengan hulu pada BAN PAUD dan PNF; 3) Penjabaran langkah-langkah mekanisme sistem pelaksanaan akreditasi, sekaligus memperjelas kontribusi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akreditasi sehingga sinergi masing-masing dapat dioptimalkan.

**Keempat**, pelaksanaan Sosialisasi akreditasi tahun 2020 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tujuan utamanya menyiapkan asesesi sasaran kegiatan piloting yang telah ditetapkan BAN PAUD dan PNF. Sosialisasi telah dilaksanakan di semua provinsi dengan jumlah capaian dan waktu pelaksanaan sesuai dengan perencanaan. Beberapa catatan evaluasi kegiatan ini antara lain: 1) Terjadinya pergantian asesesi sasaran piloting karena berbagai kendala seperti jaringan; 2) Kesiapan data yang terkait dengan Dapodik pada pengisian butir EDS-PA; 3) Prinsip pengembangan instrumen tidak secara utuh dipahami oleh satuan pendidikan sehingga berkurangnya motivasi satuan dalam mengikuti kegiatan piloting; dan 4) Rendahnya kompetensi digital asesesi dalam mengadaptasi kegiatan secara daring.

**Kelima**, Rapat Koordinasi Daerah telah dilaksanakan dengan melibatkan dinas pendidikan kabupaten kota dan stake holder lainnya. Agenda utama kegiatan ini menginformasikan kebijakan moratorium dan dukungan yang diharapkan pada kegiatan sosialisasi akreditasi dan mobilisasi peserta piloting.

Terdapat sejumlah permasalahan pada setiap kegiatan yang telah dilaksanakan. Permasalahan tersebut perlu dijadikan diskusi bersama untuk pijakan menyongsong kegiatan akreditasi tahun 2021. Selain itu, pandemik yang masih berlangsung sampai hari ini dan beberapa kebijakan baru yang telah dan sedang berkembang menjadi informasi dan bahasan penting dalam mempersiapkan rancangan kegiatan tahun 2021 antara lain pengembangan otomatisasi akreditasi. Pada konteks itulah, kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tahap II pada akhir tahun ini penting dilaksanakan. Akhirnya, semoga Rakornas tahap II dapat meningkatkan sinergitas para pihak yang berkepentingan terhadap akreditasi BAN PAUD dan PNF. Dengan demikian, akuntabilitas mutu satuan pendidikan PAUD dan PNF dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. Sebab, harus diingat bahwa kontribusi pendidikan PAUD dan PNF sangat besar untuk menjamin kualitas generasi emang bangsa.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 Badan

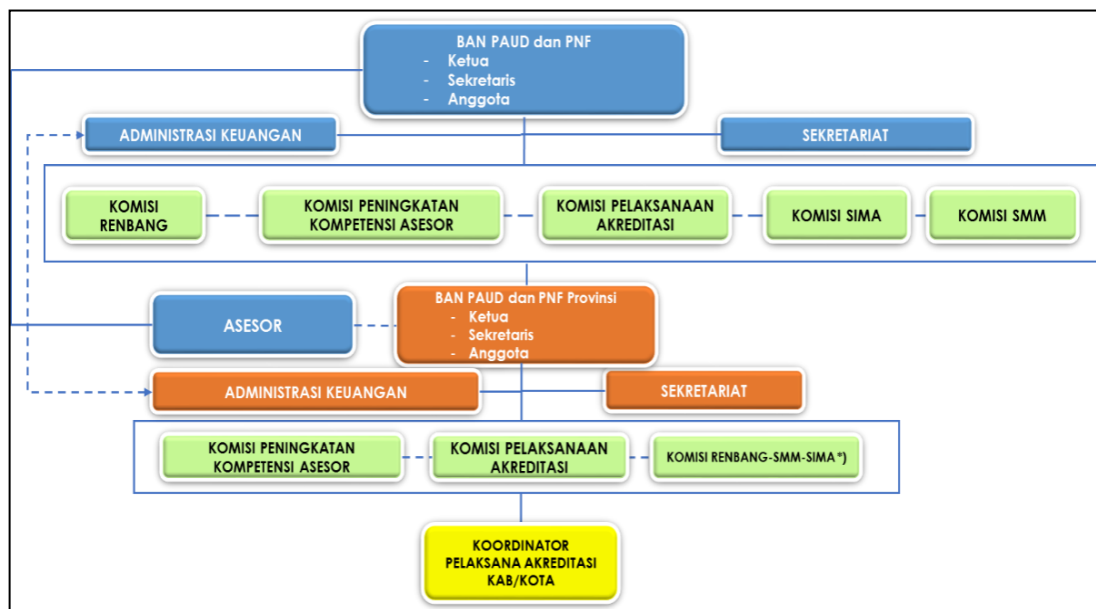
Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83304/A.A2/KU/2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018 – 2022;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2019 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi;
19. Kebijakan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF);
20. Keputusan Ketua BAN PAUD dan PNF Nomor 036A Tahun 2020 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi PAUD dan PNF untuk *Piloting*;
21. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
22. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36603/A/A5/OT/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
23. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40060/MPK.A/KP/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
24. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran Nomor SE-1/AG/2020 tentang Penjelasan Standar Biaya Masukan Dalam Pelaksanaan *Work from Home* (WFH).



### C. STRUKTUR BAN PAUD DAN PNF

Struktur organisasi BAN PAUD dan PNF dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. Struktur BAN PAUD dan PNF**

Ketentuan mengenai keanggotaan dan struktur organisasi BAN PAUD dan PNF serta BAN PAUD dan PNF Provinsi mengikuti ketentuan yang ada pada Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Berdasarkan Permendikbud ini BAN PAUD dan PNF menetapkan kembali keanggotaan 34 BAN PAUD dan PNF di Indonesia. Sebelumnya, keanggotaan BAN PAUD dan PNF Provinsi ditetapkan oleh Gubernur masing-masing Provinsi. Seiring dengan implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BAN PAUD dan PNF menetapkan kembali keanggotaan BAN PAUD dan PNF Provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur, kecuali anggota yang meninggal, tidak aktif, dan mengundurkan diri.

### D. TUJUAN

Pembuatan panduan ini bertujuan untuk dijadikan acuan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II BAN PAUD dan PNF dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi dalam melaksanakan Akreditasi PAUD dan PNF.

Tujuan khusus Rapat Koordinasi Nasional BAN PAUD dan PNF dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahap II adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan laporan evaluasi kegiatan BAN PAUD dan PNF;
2. Evaluasi program dan kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi tahun 2020 serta *lessons learned* pelaksanaan kegiatan di setiap provinsi;
3. Identifikasi permasalahan dan menetapkan solusi terhadap kegiatan BAN PAUD dan PNF;
4. Rekomendasi kebijakan akreditasi PAUD dan PNF setiap provinsi;
5. Refleksi kegiatan BAN PAUD dan PNF tahun 2020 dan tindaklanjut sebagai wujud akuntabilitas publik dan proyeksi tahun 2021;
6. Membangun sinergi antara BAN PAUD dan PNF, BAN PAUD dan PNF Provinsi serta mitra terkait dalam rangka menyukseskan program akreditasi 2021; dan
7. Perumusan dan penyampaian rekomendasi hasil kegiatan BAN PAUD dan PNF kepada para pemangku kepentingan.

#### E. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan melalui kegiatan Rapat Koordinasi Nasional BAN PAUD dan PNF dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahap II ini adalah:

1. Tersusunnya laporan evaluasi kegiatan BAN PAUD dan PNF;
2. Adanya evaluasi terhadap program dan kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi tahun 2020 dan mendapat *lessons learned* dari pelaksanaan kegiatan di setiap provinsi;
3. Teridentifikasinya permasalahan dan mendapatkan solusi terhadap kegiatan BAN PAUD dan PNF;
4. Adanya rekomendasi kebijakan akreditasi PAUD dan PNF setiap provinsi;
5. Adanya refleksi kegiatan BAN PAUD dan PNF tahun 2020 dan tindaklanjut sebagai wujud akuntabilitas publik dan proyeksi tahun 2021;
6. Adanya sinergi antara BAN PAUD dan PNF, BAN PAUD dan PNF Provinsi serta mitra terkait dalam rangka menyukseskan program akreditasi 2021; dan
7. Adanya perumusan dan penyampaian rekomendasi hasil kegiatan BAN PAUD dan PNF kepada para pemangku kepentingan.

#### F. KUOTA PILOTING

Pelaksanaan program piloting akreditasi tahun 2020 dengan distribusi kuota per provinsi sebagai berikut:

**Tabel 1. Hasil Pelaksanaan Piloting Akreditasi Tahun 2020**

NO	PROVINSI	KUOTA	CAPAIAN
1	Aceh	150	150
2	Bali	95	95
3	Banten	175	175

NO	PROVINSI	KUOTA	CAPAIAN
4	Bengkulu	105	105
5	Di. Yogyakarta	150	150
6	Dki Jakarta	150	150
7	Gorontalo	55	55
8	Jambi	150	150
9	Jawa Barat	400	400
10	Jawa Tengah	450	450
11	Jawa Timur	525	525
12	Kalimantan Barat	95	95
13	Kalimantan Selatan	125	125
14	Kalimantan Tengah	65	65
15	Kalimantan Timur	75	75
16	Kalimantan Utara	55	55
17	Kep. Bangka Belitung	55	55
18	Kepulauan Riau	75	75
19	Lampung	190	190
20	Maluku	65	65
21	Maluku Utara	55	55
22	Nusa Tenggara Barat	150	150
23	Nusa Tenggara Timur	165	165
24	Papua	65	65
25	Papua Barat	55	55
26	Riau	150	150
27	Sulawesi Barat	75	74
28	Sulawesi Selatan	210	210
29	Sulawesi Tengah	125	125
30	Sulawesi Tenggara	105	105
31	Sulawesi Utara	105	101
32	Sumatera Barat	150	150
33	Sumatera Selatan	175	175
34	Sumatera Utara	210	210
<b>TOTAL</b>		<b>5000</b>	<b>4995</b>

*\*Update data tanggal 14 Desember 2020*

#### **G. PEMBINAAN WILAYAH**

Guna memberi bimbingan, arahan dan supervisi, maka BAN PAUD dan PNF membentuk Tim Pembina Wilayah BAN PAUD dan PNF Provinsi. Tim ini terdiri atas Anggota BAN PAUD dan PNF. Mereka bertugas untuk membantu pelaksanaan tata kelola administrasi dan keuangan. Berikut adalah pembagian wilayah untuk BAN PAUD dan PNF Tahun 2021:

**Tabel 2. Pembagian Wilayah BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahun 2021**

No.	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 4	Wilayah 5
1.	Jawa Timur	Jawa Barat	Jawa Tengah	Sulawesi Selatan	Sumatera Barat
2.	Banten	Sumatera Utara	Riau	Jambi	Lampung
3.	Nusa Tenggara Timur	Aceh	Sumatera Selatan	DI Yogyakarta	Bali
4.	Kepulauan Riau	Kalimantan Barat	Sulawesi Tengah	DKI Jakarta	Nusa Tenggara Barat
5.	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara	Kep. Bangka Belitung	Bengkulu	Gorontalo
6.	Papua Barat	Sulawesi Barat	Kalimantan Selatan	Sulawesi Utara	Sulawesi Tenggara
7.		Maluku	Kalimantan Tengah	Papua	Maluku Utara

**Tim Pembina Wilayah I:**

1. Dr. Gutama, M.Pd.
2. Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.

**Tim Pembina Wilayah II:**

1. Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.
2. Ade Cahyana, M. Sc.
3. Dr. Hj. Hibana, S.Ag., M. Pd.

**Tim Pembina Wilayah III:**

1. Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Si.
2. Bahruddin
3. Dr. H. Habiburrahman, M.Pd.

**Tim Pembina Wilayah IV:**

1. Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
2. Dr. Biyanto, M.Ag.
3. Dr. Atiyah Suharti, M. Pd.

**Tim Pembina Wilayah V:**

1. Dr. Firman Hadiansyah, M.Hum.
2. Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.
3. Nasrulloh, SE., M.Si. (Han)

Pembina wilayah akan berdiskusi dengan masing-masing provinsinya. Hasil monitoring dan evaluasi tahun 2020 dijadikan bahan diskusi. Materi diskusi adalah: 1. Permasalahan di setiap rangkaian kegiatan akreditasi 2020, 2. Evaluasi efektifitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, 3. Strategi penugasan, penilaian dan

pembinaan asesor, dan 4. Usulan pelaksanaan akreditasi per rumpun (PAUD, LKP dan PKBM) baik secara daring maupun luring beserta kuotanya.

#### **H. PELAKSANAAN KEGIATAN**

##### 1) Strategi Pelaksanaan

Rapat Koordinasi Nasional BAN PAUD dan PNF dilaksanakan dalam bentuk daring baik untuk sidang pleno maupun sidang kelompok berdasarkan muatan materi yang disampaikan setiap Narasumber

##### 2) Tempat pelaksanaan kegiatan Rakornas di Pertemuan Virtual (*Zoom Meeting*)

**Meeting ID: 857-105-3278** dan **Password: BANP#2020**

##### 3) Kegiatan Rakornas Tahap II dilaksanakan pada hari Selasa s.d. Rabu tanggal **15-16 Desember 2020**

#### **I. NARASUMBER, PESERTA DAN PANITIA**

Narasumber, Peserta dan Panitia Rapat Koordinasi Nasional BAN PAUD dan PNF terdiri atas:

1. Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud;
2. Direktur Jenderal PAUD dan Dikdasmen Kemendikbud;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud;
4. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud;
5. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP);
6. Anggota BAN PAUD dan PNF;
7. Tim Ahli BAN PAUD dan PNF;
8. Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi;
9. Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi;
10. UPKK BAN PAUD dan PNF Provinsi; dan
11. Sekretariat BAN PAUD dan PNF.

#### **J. PENUTUP**

Panduan Rapat Koordinasi Nasional BAN PAUD dan PNF dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahap II disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Semoga kegiatan Rakornas dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai hasil yang diharapkan.

#### **K. LAMPIRAN**

## Lampiran 1. Materi dan Narasumber

### Materi dan Narasumber

No.	Topik	Narasumber
<b>Sidang Pleno</b>		
1.	Arah Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan PNF Tahun 2021	Plt. Kepala Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud
2.	Refleksi pelaksanaan akreditasi tahun 2020 dan prospek pelaksanaan akreditasi tahun 2021	Ketua BAN PAUD dan PNF
3.	Kebijakan dan Sinergi Pembinaan dan Akreditasi PAUD dan PNF	Direktur Jenderal PAUD dan Dikdasmen Kemendikbud
4.	Tindak Lanjut Hasil Akreditasi dalam Penyelarasan Kursus dan Pelatihan dengan DU/DI	Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud
5.	Evaluasi Anggaran Tahun 2020 dan Perencanaan anggaran tahun 2021	Sekretaris Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud
6.	Refleksi dan Proyeksi Peran Akreditasi dalam Menjamin Mutu Pendidikan Mewujudkan kompetensi Generasi 2045	Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan
<b>Diskusi Kelompok Per Wilayah</b>		
7.	1) Permasalahan di setiap rangkaian kegiatan akreditasi 2020, 2) Evaluasi efektifitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, 3) Strategi penugasan, penilaian dan pembinaan asesor, dan 4) Usulan pelaksanaan akreditasi per rumpun (PAUD, LKP dan PKBM) baik secara daring maupun luring beserta kuotanya	Tim Pembina Wilayah BAN PAUD dan PNF Provinsi

## Lampiran 2. Jadwal Kegiatan

Hari Pertama, Selasa, 15 Desember 2020

No	Waktu	Kegiatan/Topik	Narasumber	Moderator/PIC
1.	07.00 – 08.00 WIB	Peserta <i>login</i> ke media rapat secara virtual	Host (Tim Ahli)	Host (Tim Ahli)
2.	08.00 – 09.00 WIB	Pembukaan	MC	MC: Anggita Intania, S.IKom  Komisi Rembang
		Mendengarkan Lagu Indonesia Raya	-	
		Pembacaan Do'a	Alfiannor Luthfi Hasain, S.Psi.,M.Si	
		Laporan Panitia Rakornas	Prof. Dr. Ir. Hj. Netti Herawati, M.Si	
		Sambutan sekaligus Laporan Hasil Kegiatan BAN PAUD dan PNF tahun 2020	Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.	
3.	09.00 – 10.15 WIB	Sambutan Plt. Kepala Balitbang dan Perbukuan sekaligus membuka acara Rakornas II	Ir. Totok Suprayitno, Ph.D.	Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.
		Paparan Kepala Balitbang dan Perbukuan dengan topik <b>"Arah Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan PNF Tahun 2021"</b>	Ir. Totok Suprayitno, Ph.D.	
4.	10.15 – 10.30		Istirahat	
4.	10.30 – 12.00 WIB	Paparan Ketua BAN PAUD dan PNF dengan topik <b>"Refleksi Pelaksanaan Akreditasi tahun 2020 dan Prospek Pelaksanaan akreditasi tahun 2021"</b>	Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.	Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.
7.	12.00 – 13.00 WIB		Istirahat, Shalat dan Makan	
8.	13.00 – 15.30 WIB	1. Paparan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikdasmen Kemendikbud dengan topik <b>"Kebijakan dan Sinergi Pembinaan dan Akreditasi PAUD dan PNF"</b>	1. Direktur Jenderal PAUD dan Dikdasmen Kemendikbud	Dr. Firman Hadiansyah
		2. Direktorat Jenderal Vokasi Kemendikbud dengan topik <b>"Tindak Lanjut Hasil Akreditasi dalam Penyelarasan Kursus dan Pelatihan dengan DU/DI"</b>	2. Direktur Jenderal Vokasi Kemendikbud	
9.	15.30–16.00 WIB	Koordinasi Internal Anggota BAN PAUD dan PNF		

**\*Jadwal dapat berubah sesuai dengan kondisi**

**Hari Kedua, Rabu, 16 Desember 2020**

No	Waktu	Kegiatan/Topik	Narasumber	Moderator/PIC
1.	07.00 – 08.00 WIB	Peserta <i>login</i> ke media rapat secara virtual per wilayah	Host (Tim Ahli)	Host (Tim Ahli)
2.	08.00 – 10.00 WIB	Paparan Sekretaris Balitbang dan Perbukuan dengan topik <b>“Evaluasi Anggaran Tahun 2020 dan Perencanaan Anggaran Tahun 2021”</b>	Suhadi, M.Pd	Dr. Hj. Hibana, S.Ag.,M.Pd.
3.	10.00 – 10.30 WIB	Istirahat		
4.	10.30 – 12.00 WIB	Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dengan topik <b>“Refleksi dan Proyeksi Peran Akreditasi dalam Menjamin Mutu Pendidikan Mewujudkan kompetensi Generasi 2045”</b>	Ketua BSNP	Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.
5.	12.00 – 13.00 WIB	Istirahat, Shalat dan Makan		
6.	13.00 – 15.00 WIB	Diskusi Kelompok Setiap Wilayah dengan topik <b>1. Permasalahan di setiap rangkaian kegiatan akreditasi 2020, 2. Evaluasi efektifitas Perencanaan dan pelaksanaan anggaran, 3. Strategi penugasan, penilaian dan pembinaan asesor, dan 4. Usulan pelaksanaan akreditasi per rumpun (PAUD, LKP dan PKBM) baik secara daring maupun luring beserta kuotanya”</b>	Perwakilan BAN PAUD dan PNF Provinsi dari Setiap Wilayah	<b>Pembina Wilayah tahun 2020</b>
7.	15.00 – 16.00 WIB	Penutupan: a. Penyampaian Rumusan Hasil Rakornas dan Rencana Tindak Lanjut b. Penutupan	a. Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Psi. b. Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.	MC: Anggita Intania, S.IKom

**\*Jadwal dapat berubah sesuai dengan kondisi**



### Lampiran 3. Format Isian Rangkuman Diskusi Kelompok\*)

No.	Pembahasan	Hasil Diskusi
1.	Permasalahan di setiap rangkaian kegiatan akreditasi 2020, yang terdiri atas: a. Klasifikasi Permohonan Akreditasi b. Visitasi c. Validasi	
2.	Evaluasi Efektifitas Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran	
3.	Strategi Penugasan, Penilaian dan Pembinaan Asesor	
4.	Usulan pelaksanaan akreditasi per rumpun (PAUD, LKP dan PKBM) baik secara <b>daring</b> maupun <b>luring</b> beserta kuotanya	

\*) Masing-masing BAN PAUD dan PNF telah mempersiapkan bahan diskusi sesuai dengan permasalahan dan kondisi di masing-masing Provinsi



**BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Sekretariat: Komplek Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemendikbud  
Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan  
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141  
*Website* : [www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id](http://www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id), e-Mail: [info@banpaudpnf.or.id](mailto:info@banpaudpnf.or.id)